Pemerintah Terus Mendorong Percepatan Transisi Energi di Dalam Negeri Guna Mencapai Target Net Zero Emission pada 2060

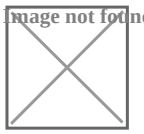

Sebagai agenda nasional, transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Dalam wawancara pada Januari 2023 silam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah telah meningkatkan target komposisi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dalam bauran energi menjadi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050.

Indonesia mempunyai potensi pemanfaatan sumber EBET, misalnya pembangunan *Green Industrial Park* di Kalimantan Utara yang sumber energinya dari Sungai Kayan. Potensi *hydro power* Sungai Kayan diperkirakan 11-13 *gigawatt*. Indonesia juga mempunyai energi hijau lainnya dalam bentuk panas bumi. Potensi panas bumi di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia dengan ratusan titik potensi yang tersebar membentang di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi panas bumi di Indonesia sekitar 23,4 *gigawatt* dengan kapasitas terpasang PLTP sebesar 2,3 *gigawatt*, sehingga Indonesia berada pada posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam memanfaatkan panas bumi sebagai tenaga listrik.

Energi panas bumi merupakan energi baik yang dihasilkan dari magma yang berada di dalam perut bumi daerah gunung vulkanik. Uap panas dan tekanan tinggi yang dipancarkan dari produksi kepala sumur *(well head)* dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin uap pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau digunakan langsung untuk mengeringkan produk pertanian. Energi panas bumi merupakan energi bersih yang bersifat berkelanjutan *(sustainable)* jika dikelola dengan baik. Panas bumi memegang peranan yang semakin penting bagi program dekarbonisasi untuk mendukung energi bersih. Pemanfaatan panas bumi ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam *Bali Compact* yang disepakati pada Presidensi G20 Indonesia 2022, yakni upaya diversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi.

Untuk melihat secara langsung penerapan transisi energi di Indonesia, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kemenko Perekonomian, Ferry Ardiyanto selaku Co-Sous Sherpa G20 Indonesia beserta Tim Sekretariat Sherpa G20 Kemenko Perekonomian mengunjungi unit pembangkit listrik panas bumi di Dieng, Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh PT Geo Dipa Energi (GDE).

Diterima oleh *General Manager* GDE Unit Dieng Herdian Ardi Febrianto, Tim Kemenko Perekonomian diajak untuk mengunjungi unit pengeboran Dieng-2, *Pad 29*, dan pembangkit listrik Dieng-1, sambil dijelaskan mengenai proses eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, hingga distribusi listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) GDE. Selanjutnya, rombongan bertemu Kepala Desa Sikunang untuk berdiskusi dan meninjau program *Corporate Social Responsibilty* PLTP GDE berupa pembangunan sumur air bersih di Desa Sikunang.

Dalam mendukung percepatan transisi energi di dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik guna mendorong target penurunan emisi Indonesia tahun 2030. Di samping itu, Indonesia meningkatkan komitmen pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi per 23 September 2022 sebesar 31,89% (sebelumnya 29%) *unconditionally* dan 43,20% (sebelumnya 41%) *conditionally*. Dengan berbagai program Pemerintah dan investasi ini, diharapkan Indonesia berpeluang mencapai target *net zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat sesuai

dengan Perjanjian Paris. (dh/dep7/map/fln)

***